

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Corporate Governance biasanya dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan, "masalah-masalah yang muncul dari pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian". Dari perspektif ini, *Corporate Governance* akan memfokuskan ke masalah bagaimana struktur internal dan pengaturan dewan direksi, isu di seputar komite audit, laporan kepada pemegang saham, dan kontrol manajemen. Lemahnya *Corporate Governance* sering disebut sebagai salah satu penyebab krisis keuangan di negara-negara Asia. Ciri utama dari lemahnya *Corporate Governance* adalah adanya tindakan mementingkan diri sendiri di pihak para manajer perusahaan. Jika para manajer perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor, maka akan menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian (*return*) atas investasi yang telah mereka tanamkan.

Berle dan Means (1934) dalam Tri (2003) menyatakan bahwa isu *corporate governance* muncul karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (*agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari

Dengan pemisahan ini, pemilik perusahaan memberikan wewenang pada pengelola (manajer) untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan lainnya untuk dan atas nama pemilik. Dengan kewenangan yang dimiliki ini, mungkin saja pengelola tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*). Dengan informasi yang dimiliki, pengelola bisa bertindak hanya menguntungkan dirinya sendiri, dengan mengorbankan kepentingan pemilik. Hal ini mungkin terjadi karena pengelola mempunyai informasi mengenai perusahaan yang tidak dimiliki pemilik perusahaan (*asymmetry information*).

Beberapa pengukuran yang digunakan untuk mengukur *corporate governance* diantaranya adalah, *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) (Rika, 2004), *Kepemilikan Institusional* (Santi, 2002; Nikmah, 2002; Seruni, 2001; Fitri, 1996; Jaja, 2001; Binsar, 2000; Faizal, 2004), *Kepemilikan Manajerial* (Santi, 2002; Erlina, 2001; Nelli, 2003; Siti, 2002; Makaryanawati, 2002; Wahidahwati, 2002; Faizal, 2004; Setiyono, 2000; Fitri, 2003; Tarjo, 2002), dan *Proporsi Dewan Direksi* (Faizal, 2004; M.Ameziane, 2002).

Corporate governance diperlukan untuk mengendalikan perilaku pengelola perusahaan agar bertindak tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan pemilik perusahaan, atau dengan kata lain untuk menyamakan kepentingan antara pemilik dengan pengelola perusahaan.

Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimumkan kesejahteraan para pemegang saham, namun manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka. Penyatuan kepentingan pihak-pihak ini seringkali menimbulkan masalah yang disebut masalah keagenan (*Agency Problem*).

Ituriaga dan Sanz (2000) dalam Faizal (2004) menyatakan bahwa struktur kepemilikan dapat dijelaskan dari dua sudut pandang yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan informasi asimetri. Husnan (2001) menyatakan bahwa *Agency Theory* mencoba untuk menjelaskan bagaimana perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perusahaan (manajer, pemilik perusahaan, dan kreditor) akan berperilaku, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Tri (2003) menjelaskan bahwa bentuk masalah keagenan yang paling umum adalah yang terjadi antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen pada struktur kepemilikan yang menyebar. Meskipun demikian, masalah keagenan dapat juga terjadi pada setiap situasi yang melibatkan usaha kerja sama antara dua pihak atau lebih meskipun tidak terdapat pemisahan hubungan yang tegas antara prinsipal dan agen. Pemilik dengan proporsi kepemilikan rendah tidak tertarik untuk melakukan pengawasan, karena akan menanggung semua biaya pengawasan (*monitoring cost*) atas sebagian kecil manfaat yang diterima. Pada saat proses *monitoring* berhasil, maka sekelompok pemilik akan menanggung semua

... .. manfaat dengan pemilik lainnya. Apabila semua

pemilik berperilaku sama maka tidak akan terjadi pengawasan yang memadai terhadap tindakan manajemen.

Akibat adanya hubungan keagenan akan menimbulkan biaya keagenan. Salah satu cara untuk mengurangi biaya keagenan adalah dengan struktur kepemilikan, struktur kepemilikan merupakan salah satu mekanisme dalam *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976), Denis dkk. (1997,1999) dalam Tri (2003) menemukan bahwa dengan kepemilikan saham oleh manajer, dapat menghilangkan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham, karena apabila manajer adalah pemegang saham maka kepentingan mereka akan sejalan dengan kepentingan pemegang saham lain, sedangkan kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor jalannya perusahaan.

La Porta dkk. (1999) dalam Tri (2004) menemukan bahwa kepemilikan yang menyebar (institusional dan manajerial) hanya terjadi pada negara dengan perlindungan legal yang sangat baik terhadap pemilik. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur kepemilikan perusahaan berbeda di tiap batasan negara, pada negara dengan perlindungan yang buruk, kepemilikan perusahaan cenderung terkonsentrasi, bahkan dalam banyak kasus, kepemilikan perusahaan lebih banyak dikendalikan keluarga atau negara.

Dewan direksi bertanggungjawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh dan secara pribadi jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Direksi diharuskan oleh UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas) RI Nomor 1 Tahun 1995

untuk menjalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, tugas-tugasnya untuk kepentingan perusahaan. Setiap anggota secara pribadi bertanggungjawab atas penyimpangan atau kelalaian dalam menjalankan tanggungjawab tersebut. Diharapkan dengan adanya dewan direksi yang bekerja secara professional dapat mengurangi biaya keagenan (*Agency Cost*) yang terjadi. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Faizal (2004).

B. Batasan Masalah Penelitian

Variabel-variabel *Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan direksi. Biaya keagenan diukur dengan perputaran aktiva dan beban operasional.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh yang positif kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi terhadap biaya keagenan yang diukur dengan tingkat perputaran aktiva?
2. Apakah terdapat pengaruh yang negatif kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi terhadap biaya keagenan yang diukur

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh yang positif kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi terhadap biaya keagenan yang diukur dengan tingkat perputaran aktiva.
2. Pengaruh yang negatif kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi terhadap biaya keagenan yang diukur dengan beban operasi

E. Manfaat Penelitian

1. Memberikan tambahan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan direksi terhadap biaya keagenan.
2. Memberikan tambahan literatur Akuntansi dan memberikan tambahan referensi bagi pihak yang tertarik dengan penelitian ini.